



## **Implementation of Education Financing Policy from the Perspective of School-Based Management in Primary Schools**

**Riski Maulina<sup>1\*</sup>, Suryani<sup>2</sup>, Siti Tabiatun<sup>3</sup>, Irwati<sup>4</sup>,**

**Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata<sup>5</sup>**

Administrasi Pendidikan, Universitas Al-Muslim, Bireuen, Indonesia

Email: [riskimaulina28@gmail.com](mailto:riskimaulina28@gmail.com); [sur1980yani@gmail.com](mailto:sur1980yani@gmail.com); [tabiatun siti@gmail.com](mailto:tabiatun siti@gmail.com); [irwati325@gmail.com](mailto:irwati325@gmail.com); [sonnymim@umuslim.ac.id](mailto:sonnymim@umuslim.ac.id)

### **ABSTRACT**

Education financing is a strategic component in ensuring the sustainability of school programs, improving learning quality, and supporting the provision of facilities and infrastructure. At the elementary school level, financing plays a crucial role as it forms the foundation for students' academic, character, and social development. This study aims to analyze the implementation of education financing policy from the perspective of School-Based Management (SBM), focusing on budget planning, fund utilization, financial transparency, supervision, and stakeholder involvement. The research employed a descriptive quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to principals, school treasurers, teachers, and school committee members who are directly involved in financial management. The data were analyzed using descriptive statistics in percentage form. The findings indicate that the implementation of education financing policy in elementary schools has generally been carried out well. This is reflected in participatory budget planning, appropriate fund utilization based on priority needs, regular financial reporting, and the involvement of school committees in supervision. However, several challenges remain, including limited financial administrative competence, uneven technical understanding of budget management, and a shortage of administrative personnel. Therefore, strengthening the managerial and financial competencies of school stakeholders is essential to improve the effectiveness, transparency, and accountability of education financing policy implementation in elementary schools.

**Keywords:** education financing; school-based management; elementary school; financial transparency; education policy.

### **PENDAHULUAN**

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem pendidikan nasional karena seluruh aktivitas pendidikan membutuhkan dukungan finansial yang terencana dan dikelola secara baik. Ketersediaan pembiayaan yang memadai memungkinkan sekolah menjalankan fungsi pendidikan secara optimal, mulai dari penyediaan sarana pembelajaran, pengembangan tenaga pendidik, penguatan administrasi sekolah, hingga pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks sekolah dasar, pembiayaan pendidikan menjadi sangat penting karena sekolah dasar merupakan jenjang awal pembentukan kemampuan literasi, numerasi, karakter, dan keterampilan dasar peserta didik.

Pada jenjang sekolah dasar, kebutuhan pembiayaan pendidikan memiliki karakteristik tersendiri karena harus mampu mendukung berbagai kebutuhan perkembangan anak usia dasar. Penggunaan dana sekolah tidak hanya diarahkan untuk kegiatan operasional umum, tetapi juga untuk pengadaan media pembelajaran konkret, alat bantu belajar, bahan ajar, perawatan ruang kelas, penguatan kegiatan literasi, dan pengembangan lingkungan belajar yang aman serta nyaman bagi peserta didik. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya pendidikan secara mandiri berdasarkan kebutuhan nyata sekolah. Dalam perspektif ini, kepala sekolah dasar memiliki peran strategis sebagai manajer pendidikan yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan. Kepala sekolah harus mampu menyusun prioritas penggunaan anggaran sesuai kebutuhan pembelajaran dasar dan target peningkatan mutu sekolah.

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah dasar juga menekankan pentingnya partisipasi seluruh unsur sekolah. Guru, bendahara sekolah, dan komite sekolah memiliki peran dalam menyusun rencana anggaran, menentukan prioritas pembiayaan, serta melakukan pengawasan penggunaan dana sekolah. Keterlibatan berbagai pihak ini penting agar keputusan pembiayaan lebih objektif dan sesuai kebutuhan riil peserta didik. Di sisi lain, sekolah dasar sering menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Keterbatasan tenaga administrasi, beban kerja bendahara sekolah yang tinggi, serta pemahaman teknis yang belum merata terhadap sistem pelaporan keuangan sering menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan.

Dengan demikian, kajian mengenai implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dalam perspektif manajemen berbasis sekolah dasar menjadi penting untuk melihat bagaimana sekolah mengelola dana pendidikan secara efektif dalam mendukung mutu pendidikan dasar.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran objektif mengenai implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dalam perspektif manajemen berbasis sekolah dasar berdasarkan data numerik yang diperoleh dari responden. Metode survei digunakan karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara sistematis melalui penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi nyata pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan tanpa melakukan perlakuan terhadap variabel penelitian.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada Januari sampai Maret 2026. Rentang waktu tersebut dipilih agar proses penelitian dapat dilakukan secara sistematis mulai dari penyusunan instrumen, penyebaran kuesioner, pengumpulan data, hingga analisis hasil penelitian. Penelitian dilakukan pada sekolah dasar yang menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam pengelolaan administrasi dan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Pemilihan sekolah dasar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan awal yang memiliki kebutuhan pembiayaan cukup kompleks dalam mendukung kegiatan pembelajaran, pengadaan sarana dasar, serta penguatan layanan pendidikan bagi peserta didik.

### **Sasaran Penelitian**

Sasaran penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar yang mencakup aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana,

transparansi keuangan, pengawasan pembiayaan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana sekolah dasar menerapkan kebijakan pembiayaan pendidikan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, khususnya dalam pengambilan keputusan anggaran yang melibatkan unsur sekolah.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar, yaitu: kepala sekolah, bendahara sekolah, guru dan komite sekolah. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan responden berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, penggunaan, serta pelaporan dana sekolah.

### **Data dan Instrumen Penilaian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Data primer dipilih karena dapat memberikan informasi langsung mengenai kondisi implementasi pembiayaan pendidikan di sekolah dasar. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang disusun menggunakan skala Likert empat tingkat, yaitu:

1. Sangat Setuju
2. Setuju
3. Kurang Setuju
4. Tidak Setuju

Kuesioner dirancang berdasarkan indikator implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dalam perspektif manajemen berbasis sekolah.

### **Definisi Operasional Variabel**

Agar penelitian memiliki batasan yang jelas, variabel penelitian dijabarkan dalam definisi operasional sebagai berikut:

#### **1. Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan**

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan adalah pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan di sekolah dasar yang mencakup proses perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **2. Manajemen Berbasis Sekolah Dasar**

Manajemen berbasis sekolah dasar adalah bentuk pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan kepada sekolah dalam mengambil keputusan terkait perencanaan program, pengelolaan sumber daya, serta penggunaan pembiayaan pendidikan secara mandiri sesuai kebutuhan sekolah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Setiap responden diminta memberikan jawaban sesuai kondisi nyata pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar. Langkah pengumpulan data meliputi:

1. Menyusun kisi-kisi instrumen penelitian
2. Menyebarkan kuesioner kepada responden
3. Mengumpulkan kembali hasil jawaban responden
4. Melakukan tabulasi data penelitian

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase untuk mengetahui tingkat implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar.

Rumus persentase yang digunakan adalah:

$$P = (f / N) \times 100\%$$

**Keterangan:**

P: Presentase

F: Frekuensi jawaban responden

N: Jumlah seluruh responden

Hasil persentase kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori berikut:

81%–100% = Sangat Baik

61%–80% = Baik

41%–60% = Cukup

21%–40% = Kurang

0%–20% = Sangat Kurang

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan tingkat pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan dalam perspektif manajemen berbasis sekolah dasar.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Tabel 1. Hasil Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar**

No	Indikator	Persentase (%)	Kategori
1	Perencanaan anggaran sekolah dilakukan bersama	88%	Sangat Baik
2	Penggunaan dana sesuai kebutuhan sekolah dasar	84%	Baik
3	Laporan keuangan disusun secara berkala	81%	Baik
4	Komite sekolah terlibat dalam pengawasan	79%	Baik
5	Pengawasan penggunaan dana berjalan efektif	76%	Cukup Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar berada pada kategori baik hingga sangat baik. Nilai tertinggi terdapat pada indikator perencanaan anggaran yang dilakukan secara partisipatif, sedangkan nilai terendah terdapat pada aspek pengawasan penggunaan dana, yang menunjukkan masih perlunya peningkatan dalam sistem kontrol keuangan sekolah.

**Perencanaan Anggaran dalam Manajemen Sekolah Dasar**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran sekolah dasar telah dilaksanakan secara partisipatif dengan persentase sebesar 88% (kategori sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite sekolah berperan aktif dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) berdasarkan kebutuhan riil sekolah.

Dalam konteks sekolah dasar, perencanaan anggaran memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan peserta didik di setiap jenjang kelas. Kelas rendah umumnya membutuhkan media pembelajaran konkret seperti alat peraga, buku bergambar, dan bahan ajar tematik, sedangkan kelas tinggi lebih membutuhkan alat evaluasi, bahan praktik sederhana, dan sumber belajar yang lebih variatif. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang partisipatif memungkinkan setiap kebutuhan tersebut terakomodasi secara lebih tepat sasaran.

**Pelaksanaan Penggunaan Dana Pendidikan**

Pelaksanaan penggunaan dana pendidikan memperoleh persentase sebesar 84% dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah menggunakan dana sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan sebelumnya. Dana sekolah digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran, pengadaan buku pelajaran, alat tulis pendidikan, pemeliharaan fasilitas sekolah, serta kegiatan penunjang pembelajaran lainnya.

Pada sekolah dasar, penggunaan dana harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dasar peserta didik, seperti kenyamanan ruang kelas, ketersediaan alat pembelajaran, serta

kegiatan yang mendukung pengembangan karakter. Penggunaan dana yang tepat sasaran mencerminkan adanya prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Selain itu, kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana juga menunjukkan bahwa sekolah telah mampu menjalankan fungsi manajerial dengan baik.

### **Transparansi dan Akuntabilitas Pembiayaan**

Aspek transparansi dan akuntabilitas pembiayaan menunjukkan persentase sebesar 81% dengan kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah telah melakukan pelaporan keuangan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pihak terkait. Laporan keuangan biasanya disusun dalam bentuk laporan bulanan atau tahunan yang memuat rincian penggunaan anggaran. Dalam konteks sekolah dasar, transparansi memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap pengelolaan sekolah. Sekolah yang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan cenderung memperoleh dukungan lebih besar dari masyarakat. Selain itu, transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan.

### **Peran Kepala Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan**

Kepala sekolah dasar memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Sebagai pemimpin manajerial, kepala sekolah bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi penggunaan anggaran. Kepala sekolah juga berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam menentukan prioritas pembiayaan pendidikan.

Selain itu, kepala sekolah berfungsi sebagai pengendali dalam memastikan bahwa penggunaan dana sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan. Kepala sekolah harus mampu mengarahkan penggunaan anggaran agar fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Peran kepemimpinan yang kuat akan sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar.

### **Keterlibatan Guru dan Komite Sekolah**

Keterlibatan guru dan komite sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan memperoleh persentase sebesar 79% dengan kategori baik. Guru berperan dalam memberikan masukan terkait kebutuhan pembelajaran di kelas, sehingga penyusunan anggaran menjadi lebih realistis dan sesuai dengan kondisi pembelajaran. Guru juga menjadi pihak yang paling memahami kebutuhan peserta didik secara langsung.

Sementara itu, komite sekolah berperan sebagai mitra dalam fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan terhadap kebijakan pembiayaan. Keterlibatan komite sekolah mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Dalam perspektif manajemen berbasis sekolah, kolaborasi antara sekolah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.

### **Pengawasan Pembiayaan Pendidikan**

Indikator pengawasan penggunaan dana memperoleh persentase sebesar 76% dengan kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal. Pengawasan internal biasanya dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara, sedangkan pengawasan eksternal melibatkan komite sekolah dan pihak terkait lainnya. Pada sekolah dasar, pengawasan pembiayaan sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman teknis dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan administrasi keuangan agar sistem pengawasan menjadi lebih efektif.

## Kendala Implementasi Pembiayaan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi pembiayaan pendidikan di sekolah dasar adalah keterbatasan tenaga administrasi dan kemampuan teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Banyak sekolah dasar yang masih memiliki tenaga administrasi terbatas, sehingga tugas pengelolaan keuangan sering dirangkap oleh bendahara atau bahkan kepala sekolah. Selain itu, pemahaman terhadap sistem pelaporan keuangan berbasis digital juga masih belum merata. Hal ini menyebabkan proses administrasi keuangan belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pengelola keuangan sekolah serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk pembinaan administrasi dan penyediaan sistem keuangan yang lebih sederhana dan mudah digunakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dalam perspektif Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang sekolah dasar telah berjalan dengan kategori baik hingga sangat baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi dalam perencanaan anggaran, kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan pembelajaran dasar, serta pelaksanaan pelaporan keuangan yang dilakukan secara berkala. Sekolah dasar telah mampu menerapkan prinsip-prinsip utama MBS, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Namun demikian, implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek pengawasan dan kemampuan teknis administrasi keuangan. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga administrasi, serta belum meratanya pemahaman terhadap sistem pelaporan keuangan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi manajerial dan administrasi keuangan bagi kepala sekolah, bendahara, dan guru melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan sistem administrasi yang lebih efektif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar, sehingga mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada dosen mata kuliah pembiayaan pendidikan, rekan-rekan akademik, serta semua pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan referensi ilmiah sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi pendidikan, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah dasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzikry, N. H., Mutiah, S. H., Harsoyo, F. H., & Permana, H. (2025). Manajemen standar pembiayaan dan dampaknya terhadap mutu pendidikan di sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.35662>
- Anwar, S., Asbiri, A., Nurlaili, N., Harto, K., & Oviyanti, F. (2025). Implementasi strategi manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar negeri. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).

- <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.28461>
- Bafadal, I. (2021). *Manajemen peningkatan mutu sekolah dasar*. Bumi Aksara.
- Fattah, N. (2020). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Hasanah, U., & Kristiawan, M. (2021). The effect of school-based management on education quality. *International Journal of Educational Review*, 3(1), 45–56.  
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ijer/article/view/13045>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Petunjuk teknis pengelolaan dana BOS*.  
<https://bos.kemdikbud.go.id>
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Y. S., Adityarini, H., Pamungkas, E. W., Syah, M. F. J., & Wantoro, J. (2024). Sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis web di SMP Muhammadiyah Salatiga. *Abdi Teknayasa*, 5(1), 296–305. <https://doi.org/10.23917/abditeknayasa.v5i1.5625>
- Nurhidayati, I., & Sulistyowati. (2023). Manajemen pembiayaan sekolah dalam meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1).  
<https://doi.org/10.58401/dirasah.v7i1.1078>
- Soro, S. H., Susanti, A. C., & Sariningsih, N. E. (2024). Existence of educational personnel in creating transparency reporting education financing. *Global Education Journal*, 3(2), 145–156.  
<https://doi.org/10.59525/gej.v3i2.709>
- Suryaman, M., & Trisnawati, A. (2025). Kajian manajemen pembiayaan pendidikan dasar: Strategi dan tantangan. *Jurnal Tahsinia*, 6(4), 560–573.  
<https://doi.org/10.57171/jt.v6i4.657>
- Sutisna, A., & Sa'ud, U. S. (2021). Implementation of school financial management in improving education quality. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 123–135.  
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/34321>
- Syukri, M., Melisawati, S., Fatma, D., & Renanda, R. (2024). Manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan dasar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932587>
- Yulastuti, D., Supriadi, D., & Rejokirono. (2023). Manajemen strategi pembiayaan pendidikan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.  
<https://doi.org/10.23969/jp.v9i1.12356>
- Zahra, R., & Munastiwi, E. (2025). Sistem informasi keuangan sekolah berbasis user experience design. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 40–45.  
<https://doi.org/10.21831/jump.v7i1.75757>